

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada bidang ekonomi dimaksudkan untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan merata. Dalam tujuan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan memperkuat pemangku kepentingan dan potensi ekonomi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih bagus. Kesejahteraan ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (Artana Yasa dan Arka, 2015).

Pembangunan nasional juga meliputi pembangunan dan peningkatan berbagai sektor yang memengaruhi kehidupan usaha atau pertumbuhan ekonomi secara umum. Pembangunan ekonomi tidak bisa dijauhkan dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengacu pada proses penambahan capacity produksi perekonomian yang diimplementasikan dalam penambahan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan fungsi-fungsi ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi masyarakat dan bertambahnya kemakmuran masyarakat. (Sadono Sukirno, 2010)

Pembangunan ekonomi dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang dimaksudkan untuk mendorong pendapatan dan kekayaan suatu bangsa dan dijalankan secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama sedemikian rupa sehingga peningkatan pendapatan masyarakat dapat memberikan kontribusi bagi

kemakmuran masyarakat. Menurut Dwi Martan dkk (2016:204) Pendapatan ialah pendapatan dari bisnis biasa perusahaan dan mengacu pada berbagai istilah misalnya penjualan (sales), biaya (fees), bunga (interest), dividen (deviden) dan royalti (royalty).

Pertumbuhan ekonomi ialah indikasi keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional atau peningkatan produksi barang dan jasa manufaktur dari periode ke periode. Indikator pertumbuhan ekonomi ialah andilnya dalam tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kawasan. Produk domestik bruto daerah dapat diartikan sebagai seluruh skor tambah yang didapat dari jumlah unit usaha di suatu daerah. Selain PDRB, UMKM juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. (Ewa Prasetyo dan Yayuk Yuliana, 2022).

UMKM ialah suatu jenis usaha yang berperan dalam mendorong dan menumbuhkan perekonomian suatu masyarakat. Keberadaan UKM dapat memunculkan lapangan kerja dan mendorong pendapatan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasar dari Pasal 33(4) UUD 1945, UKM ialah bagian yang mandiri dari perekonomian nasional dan mempunyai potensi besar untuk mendorong kesejahteraan rakyat, dan UKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. . Berdasar dari data BPS (Badan Pusat Statistik), diperoleh bahwa jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta unit pada tahun 2018. Angka ini sesuai dengan 99,9 persen dari seluruh perusahaan yang berjalan di Indonesia. Pangsa UKM dalam produk domestik bruto (PDB) ialah 60,3 persen dan 97 persen dari total angkatan kerja dan 99 persen dari jumlah lapangan kerja. Jumlah

UKM yang besar tentunya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta membentuk produk nasional bruto.

Tabel 1.1
Data Jumlah UMKM di Indonesia Periode 2016-2020

NO	JUMLAH UMKM	TAHUN
1.	61,7 Juta	2016
2.	62,9 Juta	2017
3.	64,2 Juta	2018
4.	65,5 Juta	2019
5.	64,2 Juta	2020

Sumber : Kemenkop dan UKM – Litbang KJ/and

Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 naik 5,17% lebih meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 5,07% (Sumber; Badan Pusat Statistik), hal ini membuktikan adanya kontribusi UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dengan diukur dari pendapatan nasional dan pada umumnya Produk Domestik Bruto (PDB) dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi indonesia sebesar 5,02% lebih sedikit dari capaian tahun 2018 sebesar 5,17%, tetapi pada tahun 2020 hasil dari data BPS (Badan Pusat Statistik) mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%, Hal ini mengakibatkan terjadinya deflasi pada perekonomian Indonesia atau terdapat penurunan yang drastis yang dipicu oleh ekonomi yang kurang stabil.

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 kurang stabil dan mengalami penurunan drastis dari data BPS (Badan Pusat Statistik), munculnya pandemi memberi dampak besar bagi perekonomian domestik pada banyak bangsa dan berpengaruh pada UMKM. Wren dan Lewis (2020), memperoleh adanya kecenderungan bahwa pandemi yang ada bukan cuma menurunkan dari segi kesehatan, bahkan pandemi juga memengaruhi perekonomian hampir semua negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. UMKM mempunyai kedudukan khusus di dalam perekonomian Indonesia juga terkena imbas dari pandemi.

Efek dari pandemi Covid-19 pada UMKM mengakibatkan menurunnya kinerja dari segi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang pada ujungnya berpengaruh pada segi suplai yakni munculnya PHK dan ancaman macetnya pembayaran kredit (Bakhtiar & Saragih, 2020). Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (2020), ada berbagai dampak yang muncul, yakni : a. Menurunnya permintaan dan penjualan; b. Menurunnya aktivitas, kesukaran bahkan adanya penutupan usaha (sementara/tetap); c. Distribusi yang macet; d. Kesukaran memperoleh bahan baku; e. Kesulitan memperoleh permodalan usaha.



Gambar 1. 1 Data Perbandingan Kondisi Sebelum Pandemi dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19

Sumber : Katadata Insight Center (KIC), 2020

Data grafik di atas menjelaskan terdapat perbandingan yang sangat signifikan yang berkaitan dengan situasi usaha dan setelah terpengaruh pandemi secara general. Diperoleh perskoran dari data yang diperoleh dari Katadata Insight Center (KIC) per 11 Agustus 2022 yang menyebutkan bahwa situasi sebelum pandemi, tingkat usaha berkondisi baik/amat baik sebesar 92,7%, tingkat usaha kategori biasa saja sebesar 6,3% dan usaha dengan kondisi buruk/amat buruk sebesar 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya pandemi kondisi usaha berjalan lancar, tidak mendapat banyak permasalahan, dan kondisi buruk dalam usaha relatif kecil. Di Sisi lain bila melihat kondisi usaha setelah adanya pandemi terlihat bahwa usaha dengan kondisi yang buruk/sangat buruk meningkat drastis yakni 56,8 bila dibandingkan pada awalnya yang hanya sebesar 0,1%. Dalam hal ini persentase ini menggambarkan bila kondisi usaha yang menjadi buruk karena efek dari adanya pandemi.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah total 960.000 UMKM, dan total jumlah yang terdampak pandemi covid-19 sebanyak 672.000 UMKM dari 33

kabupaten/kota. Permasalahan UMKM yang signifikan mengalami penurunan disebabkan karena permintaan masyarakat menurun, kemudian para UMKM mengalami kesulitan karena sulitnya mencari bahan baku dikarenakan banyaknya perusahaan yang tutup atau tidak menjalankan aktivitasnya (Sumber: covid.sumutprov.go.id). Dari data yang telah dipaparkan di beberapa kabupaten merasakan dampak dari pandemi ini salah satunya ialah Kabupaten Deli Serdang yang terkena dampak dari pandemi covid-19 tersebut. Peneliti memfokuskan untuk meneliti pengaruh dari pandemi covid-19 di Kec. Percut Sei Tuan salah satu kecamatan di Kab. Deli Serdang yang juga terdampak dari adanya situasi pandemi covid-19 yang permasalahannya memengaruhi kehidupan tidak hanya turunnya pendapatan ekonomi tapi juga kurangnya pemasukan modal untuk bertahan, melanjutkan dan mengembangkan kapasitas usahanya. Bagi pengusaha kecil, modal menjadi salah satu masalah dalam mengembangkan usaha dan bukan hal yang gampang untuk memperoleh akses permodalan. Dalam buku pengantar manajemen (2017: 333-334) Sudaryono menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan usaha dibutuhkan modal awal yang besarnya berbeda-beda tergantung pada jenis usaha yang ingin dijalankan serta besar kecil perusahaan tersebut dimulai.

Struktur perekonomian Indonesia mengategorikan aktivitas ekonomi dalam 3 badan usaha, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). PT. Permodalan Nasional Madani ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu wujud kepedulian Pemerintah Indonesia untuk membantu akses permodalan bagi UMKM yang ada di Indonesia yang

bertujuan pemberdayaan UMKM. Tidak hanya menjalankan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, tetapi juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen dalam bentuk kinerja program pengembangan kapasitas usaha (PKU), yang menjadi salah satu strategi pemerintah di dalam rangka pemajuan usaha-usaha yang bersifat mikro kecil.

Menurut observasi awal yang peneliti lakukan, diperoleh hasil dari observasi awal menerangkan bahwa sebelum dan sesudah para pelaku usaha/nasabah mendapatkan kredit atau terima modal dan beberapa dari pelaku usaha mengalami penurunan terhadap pendapatan. Berikut ialah data pendapatan pedagang/hari sebelum dan sesudah diterima saluran kredit.

Tabel 1.2
Data Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Kecamatan Percut Sei Tuan Sebelum dan Sesudah Menerima Penyaluran Kredit

No	Nama	Jenis	Pendapatan	
		Usaha	Sebelum	Setelah
1.	Dewi	Pedagang Ikan	500.000	550.000
2.	Ningsih	Usaha Sayuran	300.000	300.000
3.	Kartika	Fried Chicken	400.000	500.000
4.	Yuni	Mie Ayam	300.000	400.000
5.	Inem	Ayam Potong	600.000	800.000
6.	Anisa	Gorengan	200.000	250.000
7.	Dwi	Nasi Padang	300.000	500.000
8.	Argaria	Pedagang Ikan	700.000	500.000
9.	Butet	Mie Ayam	350.000	200.000
10.	Renti	Gorengan	200.000	100.000

Sumber: Pelaku UMK Kecamatan Percut Sei Tuan, 2022

Pada Tabel 1.2 Pendapatan para usaha mikro kecil di Kec. Percut Sei Tuan bahwa ada beberapa vendor mengalami penurunan pendapatan setelah menerima saluran modal kredit, disebabkan adanya pedagang yang berjualan dengan usaha yang serupa dan dilokasi yang tidak jauh jaraknya, yang dapat memicu persaingan yang serius. Menurut (Mardiana & Annisarizki, 2017), lokasi usaha memengaruhi pendapatan pedagang. Pemilik tempat usaha yang strategi bisa mendorong pendapatannya. Tempat usaha yang gampang dijangkau oleh kendaraan pribadi ataupun umum mendorong para konsumen untuk datang ke usaha tersebut.

Selain dengan tambahan modal, faktor lain dalam peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) yakni, Kualitas sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan keahlian, kemampuan dan keterampilan kerja individu. SDM memiliki fungsi menjadi penggerak sebuah lembaga/organisasi untuk mencapai tujuan eksistensi organisasi tersebut. (Matutina,2001). Penelitian yang dilakukan oleh Dheasy Amboningtyas (2019), masalah yang biasanya dihadapi oleh para pelaku UMKM di Indonesia ialah dari permodalan, yakni kesulitan dalam akses modal, termasuk di dalamnya manajemen modal kerja. Eksistensi UKM dapat terlihat dari sisi pendidikan pengelolanya dan kemampuan yang masih termasuk rendah, hal ini terlihat dari rendahnya penguasaan di bidang pengorganisasian, menjalankan teknologi serta pemasaran. Kualitas SDM mempunyai peran penting didalam meraih keberhasilan, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang canggih dan juga lengkap belum tentu memberikan jaminan terhadap keberhasilan sesuatu usaha tanpa dibarengi dengan kualitas manusia yang baik dan dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik.

Penerapan strategi pemerintah dengan adanya kinerja Program Pengembangan Kapasitas (PKU) oleh PT. Permodalan Nasional Madani yang bertujuan berfokus pada pemberdayaan UMKM dan Koperasi. PKU ialah program konkrit PNM dalam melakukan pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan pelaku UMKM sehingga usaha nasabah dapat lebih berkembang dan naik kelas.

Tabel 1.3
Data Pendapatan Usaha Mikro Kecil Kecamatan Percut Sei Tuan Sebelum dan Sesudah Melakukan Program Pengembangan Kapasitas (PKU)

No	Nama	Jenis Usaha	Pendapatan		Keterangan Pendapatan
			Sebelum	Setelah	
1.	Dewi	Pedagang Ikan	500.000	550.000	Meningkat
2.	Ningsih	Usaha Sayuran	300.000	300.000	Tetap
3.	Kartika	Fried Chicken	400.000	500.000	Meningkat
4.	Yuni	Mie Ayam	300.000	400.000	Meningkat
5.	Inem	Ayam Potong	600.000	800.000	Meningkat
6.	Anisa	Pakaian Wanita	450.000	250.000	Menurun
7.	Dwi	Nasi Padang	300.000	500.000	Meningkat
8.	Argaria	Perabot	700.000	500.000	Menurun
9.	Butet	Pedagang Buah	350.000	200.000	Menurun
10.	Renti	Gorengan	200.000	100.000	Menurun

Sumber: Pelaku UMK Kecamatan Percut Sei Tuan, 2022

Bersarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti ditemukan dari 10 pelaku UMK yang berjualan di daerah Kecamatan Percut Sei Tuan 50% mengalami kenaikan, 20% mengalami pendapatan tetap, dan 30% mengalami penurunan pendapatan. Menurut para pelaku UMK yang mengalami penurunan

disebabkan karena masih kurang paham dan membutuhkan bimbingan tentang fasilitas teknologi pemasaran digital yang sudah dilakukan oleh beberapa pengusaha UMK lainnya.

Berdasar dari dari pemaparan latar belakang, ditemukan adanya peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penulis berminat untuk menjalankan penelitian yang dimasukkan dalam judul **“Pengaruh Pemberian Kredit dan Program Pengembangan kapasitas usaha (PKU) Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UKM) Binaan PNM Mekaar Kecamatan Percut Sei Tuan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, berarti penulis mendapati beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya dampak dari pandemi covid-19 terhadap pengusaha mikro dan kecil menyebabkan penurunan pendapatan.
2. Pandemi Covid-19 memicu para pelaku usaha sulit mendapatkan akses permodalan.
3. Kualitas Sumber daya manusia (SDM) pelaku UMK masih rendah diperlukan suatu pembinaan untuk mendorong kualitas SDM.
4. Hal pengembangan kapasitas usaha perlu adanya suatu pembinaan/pelatihan bagi para pelaku usaha.

5. Perubahan pendapatan pelaku usaha mikro kecil setelah mendapatkan modal dan program pengembangan kapasitas usaha (PKU) dari PNM Mekaar.

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah di atas agar penelitian yang dilakukan lebih fokus berarti peneliti membatasi variabel yang akan dipakai yakni:

1. Penelitian ini menggunakan variabel bebas dan terikat, variabel dependen yakni pendapatan UMK sedangkan untuk variabel independennya pemberian kredit dan program pengembangan kapasitas usaha (PKU).
2. Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi tempat penelitian ini dilakukan
3. Data yang dipakai merupakan data primer dengan total sampel penelitian sebanyak
4. Pemberian kredit memengaruhi pendapatan UMK di Kec. Percut Sei Tuan
5. Program pengembangan kapasitas usaha (PKU) memengaruhi pendapatan UMK.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasar dari latarbelakang serta judul, yang menjadi permasalahan yakni :

1. Apakah ada pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan UMK di Kec. Percut Sei Tuan?
2. Apakah ada pengaruh program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) terhadap pendapatan UMK di Kec. Percut Sei Tuan?

3. Apakah ada pengaruh Kredit dan Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) terhadap pendapatan UMK di Kec. Percut Sei Tuan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk melihat apakah kredit memengaruhi secara partial pendapatan UMK binaan PNM Mekaar Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk melihat apakah program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) memengaruhi secara partial pendapatan UMK binaan PNM Mekaar Kecamatan Percut Sei Tuan.
3. Untuk melihat apakah kredit dan program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pendapatan UMK binaan PNM Mekaar Kec. Percut Sei Tuan.

1.6. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini:

1. Penulis
Penelitian ini mampu menjadi pengalaman dan dapat mendorong pengetahuan terhadap masalah perkreditas serta untuk menerapkan analisis untuk berbagai daerah.
2. Bagi PNM Mekaar
PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar, yakni merupakan badang yang berperan penting dalam mempertimbangkan hasil penelitian ini demi mengambil kebijakan

3. Dari Aspek Akademik

Diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan dijalankan di masa yang akan datang serta dapat menambah pengetahuan.



THE
Character Building
UNIVERSITY